

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 3, Malang: Bayu Media Publishing.
- Komnas HAM RI, 2022, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lan Deng, Qingyun Shen dan Lin Wang, 2009, Housing policy and finance in China: A literature review. U.S. Department of Housing and Urban Development.
- Mukti Faar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suharno, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Biaya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Tabungan Perumahan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang
Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil.

C. Jurnal

- Didi Nazmi, 2013, "*Hak Atas Air Dan Perumahan Sebagai Pemenuhan Terhadap Hak EKOSOB*", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Volume 20, Nomor 2.
- Josina Augustina Yvonne Wattimena dan Vondaal Vidya Hattu, 2021, "*Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid-19*", SASI, vol. 27, no. 1.
- Kim, Dae-Hwan, 2005, "*Urbanization and Housing Crisis in Post-War Korea*", Seoul: Seoul National University Press.
- Lea dan Bertrand Renaud, 1999, "*Contractual Savings for Housing: How Suitable Are They for Transitional Economies?*", The World Bank, Policy Research Working Paper, no. 1516.
- Mark Duda, Xiulan Zhang dan Mingzhu Dong, 2005, "*China's Homeownership-Oriented Housing Policy: An Examination of Two Programs Using Survey Data from Beijing*", Joint Center for Housing Studies Harvard University.
- Nia Kurniati, 2014, "*Pemenuhan Hak Atas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak dan Penerapannya, Menurut Komvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan budaya di Indonesia*", Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1.
- Osman Sukmana, 2016, "*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*", Jurnal Sospol, vol. 2, no. 1.
- Ridha Wahyuni, 2022, "*Perlindungan Hak atas Tempat Tinggal yang Layak Bagi Warga Terdampak Penggusuran*", Jurnal Indonesia Sosial Sains, vol. 3, no. 4.
- Stanley Chi-Wai Yeunga dan Rodney Howesb, 2006, "*The role of the housing provident fund in financing affordable housing development in China*", Habitat International, no. 30.

D. Majalah

Oswar Mungkasa, 2013, “Belajar dari Singapore’s Central Provident Fund (CPF) Sebuah Upaya Merancang Tabungan Perumahan yang Handal di Indonesia”, Hudmagz edisi 4 2013.

E. Internet

Ade Irma Junida, 2023, “Pegawai BUMN, TNI/Polri bisa jadi peserta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pada 2023”, [https://www.antaranews.com/berita/2482361/pegawai-bumn-tni-polri-bisa-jadi-peserta-Badan Pengelola-Tabungan Perumahan Rakyat-pada-2023](https://www.antaranews.com/berita/2482361/pegawai-bumn-tni-polri-bisa-jadi-peserta-Badan-Pengelola-Tabungan-Perumahan-Rakyat-pada-2023).

Ade Miranti Karunia, 2020. “Pemerintah Klaim Terbitnya PP Tabungan Perumahan Rakyat Melalui Proses yang Panjang”, [https://money.kompas.com/read/2020/06/16/204200126/pemerintah-klaim-terbitnya-pp-Tabungan Perumahan Rakyat-melalui-proses-yang-panjang](https://money.kompas.com/read/2020/06/16/204200126/pemerintah-klaim-terbitnya-pp-Tabungan-Perumahan-Rakyat-melalui-proses-yang-panjang).

Aide personnalisée au logement (APL), Service-Public.fr, <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16140>.

Administrator Badan Pusat Statistik, 2024, Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Milik Sendiri, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQ5IzI=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-status-kepemilikan-bangunan-tempat-tinggal-yang-ditempati-milik-sendiri.html%20>. Diakses pada 30 Desember 2024.

Agustina Purwanti, 2025, “Survei Litbang Kompas: Sepertiga Masyarakat Indonesia Masih Ragukan Program 3 Juta Rumah”, <https://www.kompas.id/artikel/survei-litbang-kompas-sepertiga-masyarakat-indonesia-masih-ragukan-program-3-juta-rumah>.

Central Provident Fund Board, “CPF Overview”, CPF Board, <https://www.cpf.gov.sg/member/cpf-overview>.

Central Provident Fund Board, “CPF Changes in 2025 and How They Benefit You”, <https://www.cpf.gov.sg/member/infohub/educational-resources/cpf-changes-in-2025-and-how-they-benefit-you>,

Employees Provident Fund, “About Us,” KWSP - Employees Provident Fund, <https://www.kwsp.gov.my/en/corporate/about-us>,

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. “Our Investment”, <https://www.kwsp.gov.my/en/corporate/investment>,

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, "Mandatory Contribution", <https://www.kwsp.gov.my/en/employer/responsibilities/mandatory-contribution>,

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. “Akaun Fleksibel (Akaun 3): Account Restructuring”, <https://www.kwsp.gov.my/en/w/article/epf-account-3-info>.

Nusarina Yuliasuti, “Apindo Rekomendasikan MLT BPJS Ketenagakerjaan selain Tapera”, <https://www.antaranews.com/berita/4129170/apindo-rekomendasikan-mlt-bpjs%20ketenagakerjaan-selain-tapera>.

PAG-IBIG Fund, “Corporate Profiles”, PAG-IBIG-Fund, https://www.pagibigfund.gov.ph/about_corporateprofile.html.

Tempo, 2025, “Kredit Janggal Rumah Prajurit”, <https://www.tempo.co/hukum/dudung-abdurachman-kpr-rumah-prajurit-2054273>.

